

RENCANA STRATEGI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2014 - 2018



DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH
TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk serta memperkenankan sehingga kita menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

Renstra merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode (5) lima tahun kedepan sebagai tindak lanjut pelaksanaan RPJMD Kabupaten Temanggung yang dimulai tahun 2014 sampai tahun 2018, dan Renstra mempunyai fungsi sebagai instrumen pengarah dalam tugas dan kewenangan SKPD, untuk itu pimpinan dan staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai tekad akan melaksanakan pokok pokok kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung 2014-2018.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renstra ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Temanggung

Temanggung, 10 Maret 2014
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH

SADWOKO HERI SUSATYO,S.E.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601006 198903 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat

Dalam pelayanan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dirinci berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Keputusan Menteri.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang akan timbul.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
8. Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang ,tahapan,tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPPKAD adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Temanggung 2013-2018.

Tujuan Penyusunan Renstra DPPKAD adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi DPPKAD dalam agenda bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga rencana peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan penataan aset daerah dapat terwujud sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan
2. Peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

1.4 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Strategis DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 di susun dengan memperhatikan dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018.

Selanjutnya dalam kerangka pelaksanaan setiap tahapan dari RPJMD ini maka secara hierarki RPJMD akan menjadi dasar bagi penyusunan RPJMD periode 5 tahunan dan RKPD pada setiap tahunnya, Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, dan renja SKPD pada setiap tahunnya:

1. RPJMD kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD/dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan SKPD, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD.
2. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Yang merupakan penjelasan harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD tahun sebelumnya.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya serta maksud dan tujuan.

Bab II. Gambaran pelayanan DPPKAD

Bagian ini memaparkan Tugas, Fungsi dan struktur organisasi DPPKAD, Sumber daya DPPKAD, Kinerja pelayanan DPPKAD, Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan DPPKAD.

Bab III. Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bagian ini memaparkan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKAD, Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati Temanggung, Telaah Renstra Provinsi, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bagian ini menjelaskan Visi dan Misi DPPKAD tahun 2014 - 2018 yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran jangka panjang menengah DPPKAD, strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan dari setiap strategi terpilih.

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bagian ini memaparkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja program pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya.

Bab VI. Indikator Kinerja DPPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi DPPKAD pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah terpilih, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai

Bab VII. Penutup

Bagian ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DPPKAD

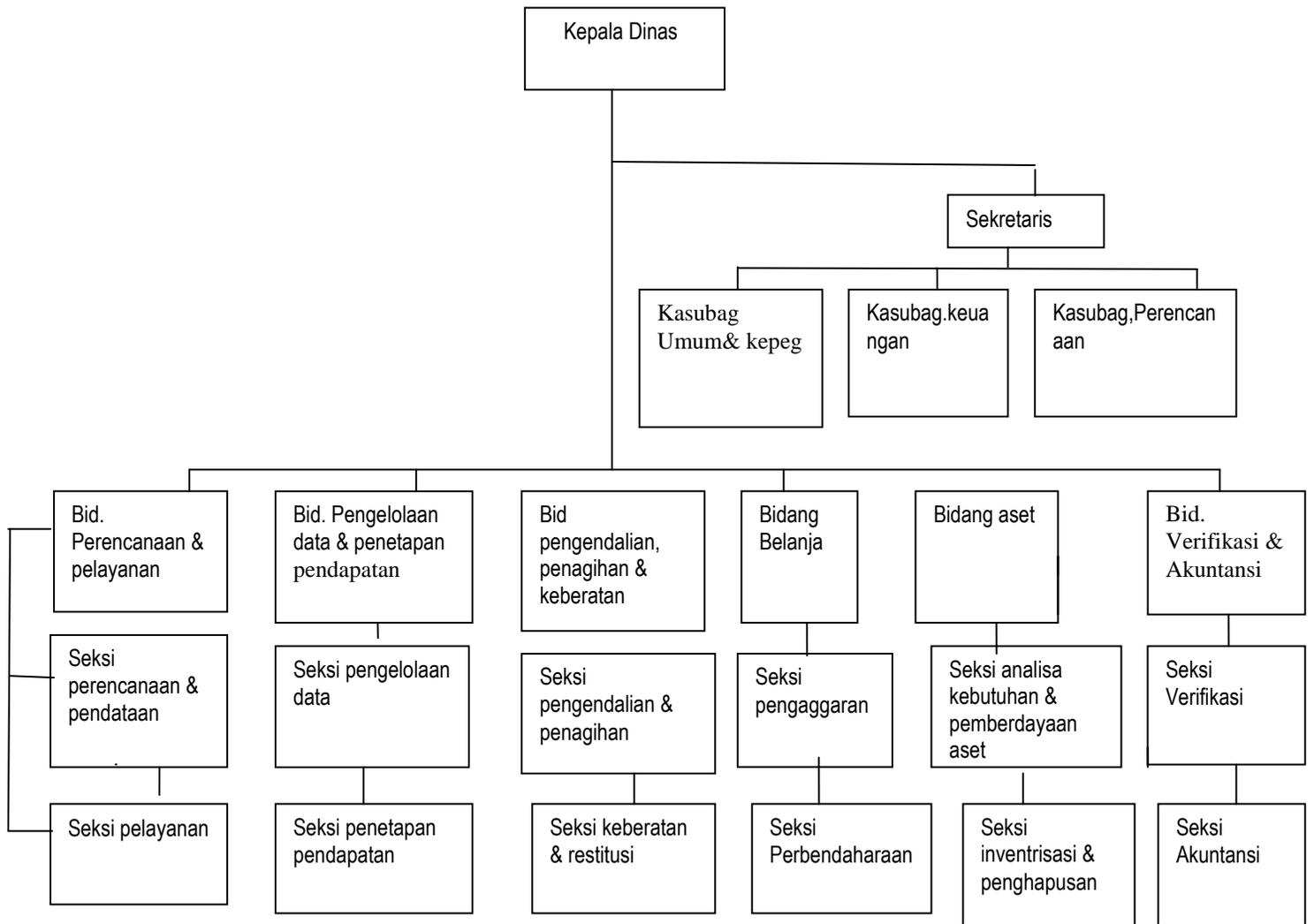
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPPKAD

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 70 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung (DPPKAD).

Susunan Organisasi dan Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung (DPPKAD), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung (DPPKAD) mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
- Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Pengordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah;
- Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- Penyusunan rancangan anggaran belanja dan pendapatan daerah, dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- Penetapan anggaran belanja dan pendapatan daerah dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah;
- Penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah;
- Penyelenggaraan pengelolaan investasi dan pemberdayaan aset daerah;
- Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- Penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
- Penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
- Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Gambar 1 Struktur organisasi DPPKAD Kabupaten Temanggung



2.2 SUMBER DAYA DPPKAD

Sumber daya DPPKAD Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi meliputi data sumber daya manusia dan aset barang / gedung yang dimiliki DPPKAD Kabupaten Temanggung.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah kepegawaian/SDM Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung 56 orang dengan perincian :

No	Uraian	Jumlah pegawai	Keterangan
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	3 orang	
	b. SMP	1 orang	
	c. SMA	13 orang	
	d. Sarjana Muda (DIII)	6 orang	
	e. S1 / D IV	19 orang	
	f. S2	13 orang	
	Jumlah		
2	Pangkat / Golongan		
	a. Gol I	3 orang	
	b. Gol II	14 orang	
	c. Gol III	30 orang	
	d. Gol IV	9 orang	
	Jumlah		
3	Jabatan		
	a. Eselon II	1 orang	
	b. Eselon III	7 orang	
	c. Eselon IV	14 orang	
	d. Eselon V	-	
	e. Jabatan Fungsional		
	f. Jabatan Fungsional Umum		
	Jumlah		
4	Jenis Kelamin		
	a. Laki – laki	30	
	b. Perempuan	26	
	Jumlah		
	Jumlah	56 orang	

2.2.2 Sumber Daya Selain Manusia

Berikut ini tabel sumber daya selain manusia di DPPKAD :

Tabel 2.2.2.1 Kendaraan Dinas yang dimiliki DPPKAD Temanggung

No	Jenis	Kondisi	Jumlah
1	Sepeda Motor	Baik	57
2	mobil	Baik	8

Tabel 2.2.2.2 Perlengkapan / peralatan kantor yang dimiliki DPPKAD

NO	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Televisi	4	Baik
2	Meja Rapat	1 unit	Baik
3	Meja dan Kursi Tamu	6 unit	Baik
4	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	1 unit	Baik
5	Tabung Gas	1	Baik
7	Filling Cabinet	25	Baik
8	Papan Tulis	2	Baik
9	Genset	1	Baik
10	Lemari Kayu	5	Baik
11	Filling Cabinet	30	Baik
12	Kursi Kerja	56	Baik
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	Baik
14	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	15	Baik
15	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	Baik
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	Baik
17	Kursi Rapat	4 unit	Baik
18	Meja Komputer	35	Baik
19	Printer	25	Baik
20	Personal Computer (PC) Unit	35	Baik
21	Faximili	1	Baik
22	Monitor	35	Baik
23	(Air Conditioner) AC Split	7	Baik
24	Alat Pemadam Kebakaran/Portable	3	Baik
25	Mesin Penghisap Debu	2	Baik
26	Rak Buku	25	Baik
27	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	10	Baik
28	White Board	8	Baik
29	Amplifier	1	Baik
30	Kompor Gas	1	Baik
31	Tempat Sampah	15	Baik

2.2.2.3 Tabel Bangunan

Berikut ini tabel Bangunan DPPKAD

No	Jenis	Kondisi	Luas
1	Bangunan Gedung kantor , Tempat Ibadah Permanen	B	1,158 m3

2.3 KINERJA DPPKAD

2.3.1 Capaian Kinerja DPPKAD Tahun 2009 – 2013

Capaian kinerja DPPKAD Kabupaten Temanggung berdasarkan rencana strategi dppkad tahun 2009 – 2013 dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013 dengan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi DPPKAD sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKAD
Kabupaten Temanggung Tahun 2009 - 2013

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke - Rasio = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Capaian}}$				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Program Penguatan kualitas pengelolaan keuangan dan Keuangan Daerah															
1	Optimalisasi target pendapatan (%)	95	95	95	95	95	100%	100%	100%	100%	100%	95	95	95	95	95
2	Terlaksananya standar akuntansi pemerintah (SAP) dalam pengelolaan keuangan daerah	83 skpd	83 skpd	83 skpd	83 skpd	83 skpd	83 skpd	83 skpd	81 skpd	81 skpd	81 skpd		81 skpd	81 skpd	81 skpd	81 skpd
3	Terlaksananya pengendalian	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x

	pelaksanaan APBD															
4	Terwujudnya penyusunan anggaran berbasis kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terlaksananya koordinasi antar SKPD pengelola pendapatn daerah	-	-	32 skpd Pengelola PAD	32 skpd Pengelola PAD	32 skpd Pengelola PAD	-	-	15 skpd Pengelola PAD	12 skpd Pengelola PAD	20 skpd Pengelola PAD	-	-	32 skpd Pengelola PAD	32 skpd Pengelola PAD	32 skpd Pengelola PAD
6	Pemutkhiran data pendapatan asli daerah (WP/bln)	-	-	674 wp/bln	690 wp/bln	705 wp/bln	-	-	690 wp/bln	446 wp/bln	450 wp/bln	-	-	690 wp/bln	446 wp/bln	450 wp/bln
7	Terwujudnya administrasi keuangan yang benar (SKPD)	71 skpd	71 skpd	71 skpd	71 skpd	71 skpd	71 skpd	71 skpd	81 skpd	81 skpd	81 skpd	81 skpd	81 skpd	81 skpd	81 skpd	81 skpd
8	Tersusunnya produk hukum daerah tentang APBD (Perda & Perbup)	3 perda 3perbup	3 perda 3perbup	3 perda 3perbup	3 perda 3perbup	3 perda 3perbup	3 perda 3perbup	3 perda 3perbup	3 perda 3perbup	3 perda 3perbup	3 perda 3perbup	3 perda 3perbup	3 perda 3perbup	3 perda 3perbup	3 perda 3perbup	3 perda 3perbup
	Program penataan dan pencatatan aset daerah															
1	Optimalisasi pencatatan & penataan aset daerah (Satker)	80 satker	140 satker	140 satker	140 satker	140 satker	71 SKPD	105 satker	105 satker	140 satker	125 satker	125 satker	125 satker	125 satker	125 satker	125 satker
2	Tersedia dokumen aset yang akuntabel (SKPD)	-	-	71 SKPD	71 SKPD	71 SKPD	-	-	71 SKPD	71 SKPD	71 SKPD	-	-	71 SKPD	71 SKPD	71 SKPD
3	Tersedianya nilai dan catatan aset yang akurat (SKPD)	-	71 SKPD	71 SKPD	71 SKPD	71 SKPD	-	70 SKPD	70 SKPD	71 SKPD	71 SKPD	-	71 SKPD	71 SKPD	71 SKPD	71 SKPD

4	Terbinanya aparat/pejabat pengelola pengguna dan pengurus barang milik daerah (SKPD)	-	-	71 SKPD	71 SKPD	71 SKPD	-	-	71 SKPD	71 SKPD	71 SKPD	-	-	71 SKPD	71 SKPD	71 SKPD
5	Terwujudnya efisiensi pemeliharaan aset SKPD (SKPD)	-	-	71 SKPD	71 SKPD	71 SKPD	-	-	71 SKPD	71 SKPD	71 SKPD	-	-	71 SKPD	71 SKPD	71 SKPD

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPPKAD Tahun 2009 – 2013

Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan DPPKAD melalui pelaksanaan renstra DPPKAD tahun 2009-2013 untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan DPPKAD Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut pada tabel 2.2

Tabel 2.3.2.

Uraian	Anggaran Pada tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada tahun ke-					Rasio Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Anggaran DPPKAD	3.971.926.250	4.883.069.500	4.681.888.300	6.357.938.650	6.040.957.765	3.229.724.123	3.919.577.627	3.884.034.896	5.372.943.518	4.992.473.601	81,31%	80,26%	82,95	84,07	84,07	10%-20%	10%-20%

Dari tabel diatas terlihat rasio antara realisasi dan anggaran dari tahun 2009 – 2013 terlihat cukup stabil hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran di DPPKAD

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DPPKAD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPPKAD tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

1. Tantangan

- Rendahnya kemampuan dan kemandirian Keuangan Daerah, sehingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah masih rendah.
- Sulitnya berkoordinasi dengan SKPD pengelola Pendapatan
- Terbatasnya sumber-sumber pendapatan asli daerah
- RKA yang dibuat oleh SKPD masih sering ada yang belum sesuai dengan PPAS
- Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Sistem administrasi pengelolaan keuangan daerah masih belum terintegrasi
- Dengan software SIAK Akrual yang baru masih sering terjadi kesulitan dan kesalahan dalam implementasinya
- Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal
- Beberapa aset tetap rusak/hilang masih tercatat dalam daftar aset
- Belum lengkapnya bukti-bukti kepemilikan dan beberapa kepemilikan aset belum didukung bukti kepemilikan yang sah
- Mewajibkan setiap terjadi mutasi pejabat di SKPD diikuti Berita Acara serah terima barang dan dokumen administrasi keuangan

2. Peluang

- Menggali dan mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan optimisasi potensi riil sumber-sumber pendapatan daerah
- Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah
- Memperbaiki sistem administrasi pendapatan daerah secara optimal
- Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan
- Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
- Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efektifitas, efisien, transparan dan akuntabel
- Perlu meningkatkan pemahaman tentang SAP melalui rapat koordinasi sehingga media rekonsiliasi antar SKPD terpenuhi.
- Meningkatkan pelayanan jasa publik penghasil PAD
- Inventarisasi aset-aset secara cermat dan akurat
- Meningkatkan pemberdayaan aset daerah
- Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang daerah
- Memberdayakan barang daerah secara tertib, efektif, efisien, dan ekonomis
- Meningkatkan penyediaan sarana-sarana pendukung berkembangnya investasi dan dunia usaha
- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses kepemilikan aset daerah

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKAD

Posisi strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam perkembangan kinerja menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan pada tiap tahunnya baik pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun Lain-lain yang sah.

Permasalahan umum yang dihadapi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung antara lain :

1. Belum diketahuinya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendekati kondisi riil
2. Sulitnya koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan
Pengelola pendapatan yang ada di SKPD masih terlambat melaporkan realisasi pendapatan dan data yang dikirim tidak valid
3. Masih adanya peraturan daerah-peraturan daerah pajak maupun retribusi daerah yang sudah tidak sesuai perkembangan dimasyarakat
Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sudah tidak relevan lagi sehingga perlu direviu atau dikaji ulang.
4. Sistem administrasi pengelolaan keuangan masih belum terintegrasi (belum menyatu) sehingga sering menimbulkan permasalahan
5. Pengelolaan barang milik daerah belum optimal
Kurangnya koordinasi antara pejabat pengurus barang dan pejabat penatausahaan keuangan di SKPD sehingga membuat laporan barang milik daerah SKPD sering terlambat .

Aspek Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yg mempengaruhi		Permasalahan pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (luar SKPD)	
Belum diketahuinya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mendekati kondisi riil	Menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah	-	SDM yang tersedia kurang memadai	Masih banyak obyek pajak yang belum sadar akan kewajiban membayar pajak	
Sulitnya koordinasi dengan SKPD pengelola	Pengelola pendapatan yang	-	Belum diadakan pendataan wajib	Data yang tersedia tidak	

pendapatan	ada di SKPD masih terlambat melaporkan realisasi pendapatan dan data yang dikirim tidak valid		pajak	akurat	
Masih adanya peraturan daerah-peraturan daerah pajak maupun retribusi daerah yang sudah tidak sesuai perkembangan dimasyarakat	Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sudah tidak relevan lagi sehingga perlu direviu atau dikaji ulang.	-	Anggaran untuk pembahasan perda pajak & retribusi daerah belum tersedia	Perlu adanya reviu perda pajak & retribusi daerah	
Sistem administrasi pengelolaan keuangan masih belum terintegrasi (belum menyatu) sehingga sering menimbulkan permasalahan	Adanya sosialisasi tentang pengadiministrasian pengelolaan keuangan daerah		SDM yang tersedia masih kurang memadai	Sarana prasarana yang tersedia juga belum maksimal	
Pengelolaan barang milik daerah belum optimal	Kurangnya koordinasi antara pejabat pengurus barang dan pejabat penatausahaan keuangan di SKPD sehingg membuat laporan barang milik daerah SKPD sering terlambat .		SDM yang tersedia masih kurang memadai	Sarana prasarana yang tersedia juga belum maksimal	

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2013 - 2018

VISI

“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”

Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Masyarakat Agamis merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.

Berbudaya merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

MISI

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 6 (enam) Misi Daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2013 - 2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sektor, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu:

“BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”

Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Motto “ BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG” DAN VISI Kabupaten Temanggung “TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNAGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH’ dengan salah satu Misi “ Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik” merupakan komitmen Bupati Temanggung dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang bebas dari korupsi. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas SDM Aparatur, sehingga dapat memberikan pelayanan public yang terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas, dan meningkatkan kualitas pengawasan internal yang dilakukan. Upaya tersebut diatas sekaligus menjadi rangkaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPKAD Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Telaahan sebagaimana dimaksud tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Faktor penghambat dan pendorong DPPKAD
Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

NO	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Visi : Mewujudkan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada pelayanan Publik			
A	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terbatasnya sdm di skpd	SKPD sering merubah pagu anggaran	Adanya revisi
B	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Terbatasnya sdm di skpd	Terbatas nya anggaran	Ada nya revisi
C	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terbatasnya sdm di skpd	Anggaran yang belum mencukupi	Ada nya revisi
D	Program peningkatan disiplin aparatur	Terbatasnya sdm di skpd	Anggaran yang belum mencukupi	Ada nya revisi
E	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terbatasnya SDM di SKPD, masih banyak SKPD yang telat melaporkan keuangan, dan masih banyak SKPD yang belum mengerti `tentang penatausahaan keuangan daerah	Masih banyak SKPD yang belum bisa mengoperasikan software sehingga menjadi penghambat	Ada nya sosialisasi pengoperasian Software tentang keuangan daerah
F	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten	Terbatasnya pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan	Terbatasnya SDM	Sosialisasi tentang penyusunan

				laporan keuangan daerah
G	Program Penataan peraturan Perundang-undangan	Kesulitan dalam penelusuran piutang daerah yang harus di telusuri karena tidak ada by name dan by address	Data yang ada terkadang tidak valid	Adanya kerjasama dan kesadaran antar wajib pajak
H	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Data bagi PTT dan Tenaga kontrak untuk jaminan sosial harus ada klaim	Anggaran kuang	Klaim terbayar
I	Program pengelolaan barang milik daerah	Pemahaman tentang penatausahaan pengelolaan barang milik daera masih kurang	SDM yang tersedia tidak mencukupi baik dari pemahaman, SIMBADA maupun inventarisasi barang milik daerah	Adanya pembinaan ke pejabat pengurus

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

Isu – isu strategis pelayanan DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 dilakukan oleh DPPKAD pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung (DPPKAD) Kabupaten Temanggung dengan melibatkan semua kepala bidang, kepala seksi, pejabat fungsional dan beberapa staf. Isu – isu strategis yang disepakati adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan dan kemandirian keuangan daerah
2. Sulitnya berkoordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan
3. Perekonomian Kabupaten Temanggung yang berbasis agraris atau bukan daerah wisata, industri, dan bisnis, sehingga kurang mendukung pertumbuhan jumlah dan peningkatan penerimaan pajak daerah.
4. Upaya mempertahankan opini WPT atas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Temanggung
5. Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal
6. Software SIAK aktual yang baru masih sering terjadi kesulitan dan kesalahan dalam implementasinya dikarenakan SDM belum sepenuhnya mengimplementasikan software SIAK
7. Masih banyak SKPD yang melaporkan SPJ dan laporan keuangan terlambat
8. Pengelolaan Barang Milik Daerah belum optimal

9. Adanya barang yang mangkrak dan rusak tidak dilaporkan/diserahkan ke pengelola
10. Beragamnya pemahaman pejabat pengurus barang dan/atau pembantu pejabat pengurus barang terhadap kebijakan pengelola barang
11. Belum lengkapnya bukti-bukti kepemilikan aset dan beberapa kepemilikan aset belum didukung bukti kepemilikan yang sah
12. Beberapa aset tetap rusak/hilang masih tercatat dalam daftar aset.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi DPKAD

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Pernyataan Visi DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah ” “TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”

” penjelasan dari pernyataan visi adalah sebagai berikut :

Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Masyarakat Agamis merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.

Berbudaya merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan Misi DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Tahun 2014 - 2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sector, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu:

“BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”

Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKAD

Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran Renstra DPPKAD sebagai berikut **MASIH DIRAPATKAN**

Mrdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;

Tujuannya :- Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan perempuan , perlindungan perempuan dan perlindungan anak

Misi 5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan

Tuju: Meningkatkan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga melalui KB

Sasaran : Meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga .

Misi 6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Tujuannya : - Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan Nepotisme

- Meningkatkan kualitas perencanaan , evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah

sasaran : - meningkatnya kemampuan , profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur

- meningkatnya kualitas perencanaan , evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKAD
 Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatkan kapasitas kemampuan keuangan daerah dan Akuntabilitas Aset Daerah	Meningkatkan kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	Rasio realisasi pendapatan daerah terhadap potensi pendapatan daerah	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
			Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Rasio pendaptan asli daerah terhadap pendapatan daerah	9	9	9	9	9
		Meningkatnya tertib administrasi aset	Presentase tertib administrasi aset daerah di SKPD	68	68	70	75	80

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPPKAD

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi DPPKAD adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPPKAD Kabupaten Temanggung tahun 2014 – 2018 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan kebijakan DPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3.
Strategi dan kebijakan DPPKAD
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

VISI : TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH			
Misi 6. Mewujudkan peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	-Peningkatan kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah - Peningkatan tertib administrasi aset pemerintah daerah	-Meningkatkan kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah khususnya pada aspek pendapatan asli daerah -Meningkatkan tertib administrasi aset yang di miliki daerah

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
PENDANAAN INDIKATIF

DPPKAD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2014 – 2018 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan pembangunan daerah
 - a. Penyusunan KUA & PPAS
2. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d. Penyediaan alat tulis kantor
 - e. Penyediaan barang cetak dan penggandaan
 - f. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
 - h. Penyediaan makan dan minuman
 - i. Rapat – rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah
 - j. Rapat – rapat koordinasidan konsultasi dalam daerah
 - k. Jasa pelayanan perkantoran
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Penyusunan DED gedung arsip DPPKAD
 - b. Pengadaan kendaraan dinas.operasional
 - c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.operasional
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 - h. Pengadaan sarana & prasarana pajak daerah & PBB
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.operasional mantri pajak
4. Program peningkatan disiplin aparatur
 - a. Pengadaan pakian dinas beserta perlengkapannya
5. Program peningkatan & pengembangan pengelola keuangan daerah
 - a. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah
 - b. Pengelolaan admistrasi gaji
 - c. Monitoring & evaluasi pendapatan asli daerah
 - d. Stok opname benda/barang berharga (retribusi daerah)
 - e. Percepatan pemasukan PBB dan Intesifikasi Pajak daerah
 - f. Verifikasi dan pengesahan DPA
 - g. Pengelolaan keuangan daerah
 - h. Penyusunan perda dan perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung
 - i. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

- j. Verifikasi RKA
 - k. Asistensi penyusunan laporan keuangan
6. Program Pembinaan & fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota
- a. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah
7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- a. Penyusunan Raperbup penghapusan piutang daerah
8. Program Pembinaan & pengembangan aparatur
- a. Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja non PNS (bg PTT & Tenaga Kontrak)
9. Program Pengelolaan barang milik daerah
- a. Pengelolaan barang milik daerah
 - b. Analisis kebutuhan & inventarisasi barang milik daerah
 - c. Pemanfaatan & penghapusan barang milik daerah
 - d. Pemeliharaan Simbada

Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana terlampir.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DPPKAD
Kabupaten Temanggung

M SI	T u j u a n	sasa ran	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data capaian pada tahun 2012	Target kinerja dan kerangka pendanaan													
						2013 (sesuai APBD 2013)			sesuai (DPA SKPD 2014)		2015		2016		2017		2018		
						target	predi ksi capai an	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Me wuj ud ka n pe nin gk ata n pel aks an aa n pe	M en in gk at ka pa sit as ke m a m pen	Men ingk atny a kap asit as kem amp uan keu ang an dan pen		Persentase anggaran penatausahaa n SKPD terhadap total belanja langsung SKPD dalam satu tahun															
			1. Program Perencanaan pembanguna n daerah																

me rint ah an yg ber sih	pu an ke ua ng an da ah	gelo laan keu ang an daer ah	Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusun nya KUA & PPAS	1 0 0 %	Tersusun nya KUA & PPAS	KUA & PPA S yg telah diset ujui	59.800.000	Tersusun nya KUA & PPAS	59.800.000	Tersusun nya KUA & PPAS	70.000.000	Tersusun nya KUA & PPAS	70.000.000	Tersusun nya KUA & PPAS	75.000.000	Tersusun nya KUA & PPAS	75.000.000
--	--	--	-------------------------------	----------------------------------	------------------	----------------------------------	---	------------	----------------------------------	------------	----------------------------------	------------	----------------------------------	------------	----------------------------------	------------	----------------------------------	------------

, trans paran, Tidak KK N dan ber ien tas i pa da pel aya na n pu bli k	er ah da n ak un ta bil ita s as se t da er ah	b	F	Tersusun	100%	Tersusun	Dokumen	1.000.000	Dokumen	1.000.000	Dokumen	1.000.000	Dokumen	200000	Dokumen	1.000.000	Dokumen	1.000.000
			a	dokumen														

2

P
r
o
g
r
a
m

P
e
l
a
y
a
n
a
n
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
s
i
p

			a	Pembelian materai, prangko benda-benda pos lainnya	100%	Tersedia pembelian meterai & benda pos lainnya	Pembelian materai, perangkobenda pos lainnya	5.000.000								
--	--	--	---	--	------	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------

			c.	P e n y e d i a n k e b e r s i h a n k a n t o r	Alat kebersiha n kantor	100%	Tersed ianya alat kebersi han kantor	Alat kebe rsiha n kant or	82.000.000	Alat kebersih an kantor	82.000.000	Alat kebersih an kantor	Alat kebersih an kantor				Alat kebersi han kantor		
												85.000.000		87.000.000	Alat kebersih an kantor		87.000.000		87.000.000

			d	P e n y e d i a a n a l a t t u l i s k a n t o r	Alat tulis kantor dan kelancaran tugas kantor	100%	Tersedianya alat tulis kantor	Alat tulis kantor & kelancaran tugas kantor	23.800.000	Tersedianya alat tulis kantor	20.000.000	Tersedianya alat tulis kantor	25.000.000	Tersedianya alat tulis kantor	25.000.000	Tersedianya alat tulis kantor	25.000.000
--	--	--	---	---	---	------	-------------------------------	---	------------	-------------------------------	------------	-------------------------------	------------	-------------------------------	------------	-------------------------------	------------

			e	P e n y e d i a a n b a r a n g c e t a k a n & p e n g g a n d a a n	Barang cetakan dan penggand aan dan kelancara n dlm melaksan akan tugas kantor	100%	Tersed ianya barang cetak an dan pengg andaan	Bara ng ceta kan & peng gand aan	35.000,000	Tersedi anya barang cetakan dan pengga ndaan	37,000,000	Tersedia nya barang cetakan dan penggan daan	37,000,000	Tersedian ya barang cetakan dan penggand aan	37,000,000	Pembeli an materai, perangk o benda pos lainnya	37,000,000	Tersedia nya barang cetakan dan penggan daan	37,000,000
--	--	--	---	---	--	------	---	--	------------	--	------------	--	------------	---	------------	---	------------	--	------------

			f.	P e n y e d i a n k o m p o n e n i n s t a l a s i l i s t r i k , p e n e r a n g a n b a n	Alat-alat listrik kantor & kelancaran dlm melaksanakan tugas	100%	Tersedia nya alat-alat listrik kantor	Terbeli alat-alat listrik kantor	4.000.000								
--	--	--	----	---	--	------	---------------------------------------	----------------------------------	-----------	----------------------------------	-----------	----------------------------------	-----------	----------------------------------	-----------	----------------------------------	-----------

			h.	P Mekan & eminum n pegawai, y rapat & tamu d i a a n m a k a n a n & m i n u m a n	100%	Tersedia Makan & minum pegawai , rapat & tamu bulan	Terlak sanan ya Maka n & minu m pega wai, rapat & tamu bulan	24.981.000	Tersedia Makan & minum pegawai, rapat & tamu bulan	24.516.000	Tersedia Makan & minum pegawai, rapat & tamu bulan	25.000.000	Tersedia Makan & minum pegawai, rapat & tamu bulan	25.000.000	Tersedia Makan & minum pegawai, rapat & tamu bulan	27.000.000	Tersedia Makan & minum pegawai, rapat & tamu bulan	27.000.000
--	--	--	----	--	------	--	---	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------

i.

Rapat-rapat koordinasi

Rapat koordinasi
keluar daerah dan
guna
memperlancar tugas

100%

Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah

85.000.000

Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah

85.000.000

Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah

85.000.000

Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah

90.000.000

Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah

90.000.000

Terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah

90.000.000

			k	Rapat koordinasi dalam daerah dan t guna - memperlancar tugas	100%	Terlaksananya rapat koordinasi dlm daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dlm daerah	5.000.000	5.000.000	Terlaksananya rapat koordinasi dlm daerah	5.000.000	Terlaksananya rapat koordinasi dlm daerah	5.000.000	Terlaksananya rapat koordinasi dlm daerah	5.000.000
--	--	--	---	---	------	---	---	-----------	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------

		I.	J	Pembayara	100%	Tersedia	Terba	90.000.000	Terbayarn	90.000.000	Terbayarn	90.000.000	Terbayar	90.000.000	Terbaya	90.000.000
			a	n gaji		nya gaji	yarny		a gaji		ya gaji		nya gaji		rnya gaji	
			s	penjaga		penjg	a gaji		penjg mlm		penjg mlm		penjg		penjg	
			a	mlm &		mlm &	penjg	90.000.000	&	90.000.000	&	mlm &	mlm &	90.000.000	mlm &	90.000.000
			P	pembayara		pembayar	mlm &		pembayar		pembayar		pembaya		pembayar	
			e	n lembur		aran	pemb		an lembur		an lembur		ran		aran	
			l	pegawai		lembur	ayara		pegawai		pegawai		lembur		lembur	
			a	dppkad		pegawai	n		dppkad		dppkad		pegawai		pegawai	
			y			dppkad	lembu						dppkad		dppkad	
			a				r									
			n				pega									
			a				wai									
			n				dppka									
			P				d									
			e													
			r													
			k													
			a													
			n													
			t													
			o													
			r													
			a													
			n													
			2. Program													
			peningkatan													
			sarana dan													
			prasarana													
			aparatur													

			a.	P e n g a d a n d a n p e r l e n g k a p a n g e d u n g k a n t o r	Meubeleir, pengadaan alat-alat studio pengadaan computer, pembelian CCTV	100%	Tersedia nya sarana & prasaran a gedung kantor untuk kelancara n tugas	Terbeliny a sarana & prasaran a gedung kantor untuk kelancara n tugas	155.971.000	Terbelinya meubeleir & tambang Lift	120.000.000	Terbeliny a sarana & prasaran a gedung kantor untuk kelancara n tugas	100.000.000	Terbeliny a sarana & prasaran a gedung kantor untuk kelancara n tugas	100.000.000	Terbel inya saran a & prasar ana gedun g kantor untuk kelanc aran tugas	100.000.000	Terbeli nya sar ana & prasa na ged ung kantor unt uk kela ncara n tugas	60.000.000
--	--	--	----	---	---	------	--	---	-------------	--	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	--	------------

			b.	Pemeliharaan gedung kantor, kelancaran dlm melaksanakan tugas & terjaganya kenyamanan kantor	100%	Tersedia nya alat kebersihan kantor	Tersedia nya alat kebersihan kantor	23.500.000	Tersedianya alat kebersihan kantor	23.500.000	Tersedia nya alat kebersihan kantor	23.500.000	Tersedia nya alat kebersihan kantor	25.000.000	Tersedianya alat kebersihan kantor	25.000.000	Tersedianya alat kebersihan kantor	25.000.000
--	--	--	-----------	--	------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------	------------------------------------	------------	-------------------------------------	------------	-------------------------------------	------------	------------------------------------	------------	------------------------------------	------------

	d	P e m e l i h a r a a n r u t i n / b e r k a l a p e n g k a p a n g e d u n g k a n t o	Terpelihara kelengkapan gedung kantor	100%	Terpelihara ranya kelengkapan gedung kantor	Terbayarnya jasa servis genset & lift	6.900.000	Terbayarnya jasa servis genset & lift	7000.000	Terpelihara ranya kelengkapan gedung kantor	7.500.000	Terpelihara ranya kelengkapan gedung kantor	7.500.000	Terpelihara ranya kelengkapan gedung kantor	8.000.000	Terpelihara ranya kelengkapan gedung kantor	9.000.000

			e.	P e m e l i h a r a a n r u t i n / b e r k a l a p e r a l a t a n g e d u n g k a n t o r	Terpelihara peralatan gedung kantor	100%	Terpelihara peralatan gedung kantor	Terbayarnya jasa servis peralatan gedung kantor	30.000.000	30.000.000	Terbayarnya jasa servis peralatan gedung kant	30.000.000	Terbayarnya jasa servis peralatan gedung kant	30.000.000	Terbayarnya jasa servis peralatan gedung ka	30.000.000	Terbayarnya jasa servis peralatan gedung ka	30.000.000

			f.	P Terpelihara nya kendaraan dinas/operasional dan memperlan car tugas untuk mantri pajak n r u t i n / b e r k a l a k e n d a r a a n d i n a s / o p e r a s i o	100%		Terpelihara nya kendaraan dinas/operasional dan memperlan car tugas untuk mantri pajak	Terpelihara nya kendaraan dinas/operasional dan memperlan car tugas untuk mantri pajak	20.000.000	Terpelihara nya kendaraan dinas/operasional dan memperlan car tugas untuk mantri pajak	30.000.000								
--	--	--	----	--	------	--	--	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------

			a.	P e n d i n a s b e s e r t a p e r l e n g k a p a n n y a	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpakainya pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	12.000.000	-	Terpakainya pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	12.000.000	Terpakainya pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	12.000.000
--	--	--	----	--	---	------	---	---	---	------------	---	---	---	------------	---	---	------------

			4. Program peningkatan & pengembangan pengelola keuangan daerah																	
			a Penyusunan system informasi keuangan daerah	Terpelihara SIKD 70%	Terpelihara SIKD	SIKD yg siap digunakan 100.000.000	SIKD yg siap digunakan 25.000.000	SIKD yg siap digunakan 150.000.000	SIKD yg siap digunakan 25.000.000	SIKD yg siap digunakan 25.000.000										
			b Pengelolaan administrasi gaji	Terpeliharaananya daftar gaji PNS 70%	Tersedianya daftar gaji bg PNS	200.000.000	Tersedianya daftar gaji bg PNS 200.000.000	Tersedianya daftar gaji bg PNS 210.000.000												

			dVerifikasi & . pengesahan DPA	DPA yang telah diverifikasi	75%	DPA yang telah diverifikasi	Tertip administrasi keuangan	39,930,000	DPA yang telah diverifikasi	40,000,000	DPA yang telah diverifikasi	45,000,000						
--	--	--	--------------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	------------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------

			e Pengelolaan . keuangan daerah	Terwujudnya peningkatan dan pendapatan daerah	98%	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan SKPD	2,285,000,000	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan SKPD	2,750,000,000	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan SKPD	2,800,000,000	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan SKPD	3,000,000,000	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan SKPD	3,250,000,000	Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah dan SKPD	3,500,000,000
--	--	--	---------------------------------	---	-----	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

		f. Penyusunan buku potensi pajak daerah	Meningkatnya pendapatan pajak daerah	Meningkatnya pendapatan pajak daerah	109,789,600	Meningkatnya pendapatan pajak daerah	109,789,600	-	-	-	-	-	-	Meningkatnya pendapatan pajak daerah	164,684,400
--	--	---	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------	--------------------------------------	-------------	---	---	---	---	---	---	--------------------------------------	-------------

		g Penyusunan . perda dan pebup tentang APBD Kabupaten Temanggung	T er su su ny a p er d a t t g A P B D, P e r u b a h a n A P B D, d a n p e r t a n g g u n g j a w a b a n	78%		Tersedianya perda ttg APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD	Tertip administrasi keuangan	700,684,500	Tersedia nya perda ttg APBD, Perubahan APBD dan pertanggung jawaban APBD	623,600,000	Tersedi anya perda ttg APBD, Peruba han APBD dan pertan ggung jawab an APBD	750,000,000	Tersedi anya perda ttg APBD, Peruba han APBD dan pertang gung jawab an APBD	750,000,000	Terse diany a perda ttg APBD , Perub ahan APBD dan pertan ggung jawab an APBD	750,000,000	Ter sedi any a per da ttg AP BD, Per uba han AP BD dan pert ang gun g jaw aba n AP BD	775,000,000
--	--	--	--	-----	--	---	------------------------------	-------------	--	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

			h Verivikasi . RKA	RKA yang telah diverifikasi	94%	RKA yang telah diverifikasi	Tertip administrasi keuangan	44,825,000	RKA yang telah diverifikasi	40,000,000	RKA yang telah diverifikasi	50,000,000						
--	--	--	--------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	------------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------

			<p>j. stock pname enda/barang erharga retribusi aerah)</p>	<p>P e m b u k u a n, in ve st as i, & p e l a p o r a n k a r c i s r e t r i b u s i s e s u a i t a r g e t</p>	50%	<p>Tertibnya pembukuan, investasi & pelaporan karcis retribusi sesuai target</p>	<p>Tertib administra si keuangan</p>	10,000,000	<p>Tertibnya pembuku an, investasi & pelapor an karcis retribusi sesuai target</p>	18,000,000	<p>Tertibn ya pembu kuan, investa si & pelapor an karcis retribus i sesuai target</p>	20,000,000	<p>Tertibn ya pembu kuan, investa si & pelapor an karcis retribus i sesuai target</p>	25,000,000	<p>Tertib nya pemb ukuan , invest asi & pelap oran karcis retribu si sesuai target</p>	30,000,000	<p>Tert ibny a pe mb uku an, inve stas i & pela por an karc is retri busi ses uai targ et</p>	30,000,000
--	--	--	--	--	-----	--	--	------------	--	------------	---	------------	---	------------	--	------------	---	------------

			k Pemutakhiran data piutang PBB-P2	Dat piutang PBB-P2	45%		Tersedianya data piutang PBB-P2	Tersedianya data piutang PBB-P2	49,773,500	Tersedianya data piutang PBB-P2	58,000,000	Tersedianya data piutang PBB-P2	55,000,000	Tersedianya data piutang PBB-P2	50,000,000	Tersedianya data piutang PBB-P2	50,000,000	Tersedianya data piutang PBB-P2	50,000,000
--	--	--	------------------------------------	--------------------	-----	--	---------------------------------	---------------------------------	------------	---------------------------------	------------	---------------------------------	------------	---------------------------------	------------	---------------------------------	------------	---------------------------------	------------

5 Program . pembinaan dan pengembangan aparatur	Penyediaan a Jamsostek . non PNS (bagi PTT dan tenaga kerja)	Terbayarnya jamsostek bagi PTT dan pegawai kontrak	45%	Terbayarnya jamsostek bagi PTT dan pegawai kontrak	Perlindungan bagi PTT dan pegawai kontrak	126,385,000	Terbayarnya jamsostek bagi PTT dan pegawai kontrak	1111111111111	Tersedianya data piutang PBB-P2 Terbayarnya jamsostek bagi PTT dan pegawai kontrak	100,000,000	Terbayarnya jamsostek bagi PTT dan pegawai kontrak	Terbayarnya jamsostek bagi PTT dan pegawai kontrak	Terbayarnya jamsostek bagi PTT dan pegawai kontrak
---	--	--	-----	--	---	-------------	--	---------------	---	-------------	--	--	--

			6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota							
	a. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	T	Tersusunnya laporan keuangan pemerintah kabupaten temanggungtepat waktu	Tersusunnya laporan keuangan pemerintah kabupaten temanggungtepat waktu	Tersusunnya laporan keuangan pemerintah kabupaten temanggungtepat waktu	224,808,500	Tersusunnya laporan keuangan pemerintah kabupaten temanggungtepat waktu	225,000,000	Tersusunnya laporan keuangan pemerintah kabupaten temanggungtepat waktu	Tersusunnya laporan keuangan pemerintah kabupaten temanggungtepat waktu

			b Pembinaan dan pendampingan implementasi system informasi akuntansi keuangan daerah	I n d i c a t o r (o u t p u t)	-				Terwujud nya sistem administr asi keuanga n daerah yang sesuai SAP	75,000,000	Terwujudnya sistem administrasi keuangan daerah yang sesuai SAP	120,000,000	Terwujudnya sistem administrasi keuangan daerah yang sesuai SAP	150,000,000
--	--	--	---	---	---	--	--	--	---	------------	---	-------------	---	-------------

			7. Program pengelolaan barang milik daerah									
			a Pengelolaan barang milik daerah	Tertipnya penataan barang milik daerah	83,10%	83%	95%	200,000,000	Tertipnya penataan barang milik daerah	193,090,000	Tertipnya penataan barang milik daerah	Tertipnya penataan barang milik daerah

			b Pembinaan pejabat pengurus barang	T e r l a k s a n a n y a p e m b i n a a n	95,52%	-	-	-	-	-	Terlak san an ya p e m b i n a n p e j a b a t p e n g u r u s b a r a n	100,000,000	Terlaksananya pembinaan pejabat pengurus barang	125,000,000
--	--	--	---	--	--------	---	---	---	---	---	---	-------------	--	-------------

c. Penelusuran aset daerah	T e r l a k s a n n y a p e n e l u s u r a n a s e t d i j a r a n d i n a s p e	92,68%	-	-	-	-	-	-	-	-
----------------------------	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

			d Analisis . kebutuhan dan inventaris barang milik daerah	T e r l a k s a n a n y a i n v e n r a t i s a s i b a r a n g m i l i k d a e r a h	-	83%	95%	20,000,000	Terlaksananya invenratisasi barang milik daerah	19,890,000	Terlaksananya invenratisasi barang milik daerah	25,000,000	Terlaksananya invenratisasi barang milik daerah	30,000,000
--	--	--	---	---	---	-----	-----	------------	---	------------	---	------------	---	------------

		e.Pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah	T e r l a k s a n y a p e n g h a p u s a n b a r a n g m i l i k d a e r a h y a n g s u d	-	83%		95%	80,000,000	Terlaksananya penghapusan barang milik daerah yang sudah rusak berat serta melaksanakan pengemanan barang milik daerah dengan cara memasang tanda kepemilikan aset	80,000,000	Terlaksananya penghapusan barang milik daerah yang sudah rusak berat serta melaksanakan pengemanan barang milik daerah dengan cara memasang tanda kepemilikan aset	100,000,000	Terlaksananya penghapusan barang milik daerah yang sudah rusak berat serta melaksanakan pengemanan barang milik daerah dengan cara memasang tanda kepemilikan aset	120,000,000
--	--	---	--	---	-----	--	-----	------------	--	------------	--	-------------	--	-------------

			f. Pemeliharaan simbada	Terpeliharanya program/sistem simbada	-	-	-	-	Terpeliharanya program/sistem simbada	15,000,000	Terpeliharanya program/sistem simbada	50,000,000	Terpeliharanya program/sistem simbada	20,000,000
--	--	--	-------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	---------------------------------------	------------	---------------------------------------	------------	---------------------------------------	------------

		g Penyusutan barang milik daerah	T e r l a k s a n a n y a p e n y u s u t a n b a r a n g m i l i k d a e r a h	-	-	-	-	Terpeliharaanya program/ sistem simbada	300,000,000	-	-	-	-
--	--	----------------------------------	--	---	---	---	---	---	-------------	---	---	---	---

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DPPKAD YANG MENGACU PAD

A TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 – 2018

Indikator kinerja DPPKAD kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPPKAD Kabupaten Temanggung pada tahun 2014 – 2018 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :

Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA DPPKAD

NO	INDIKATOR SASARAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung (DPPKAD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018, melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan mempedomani dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah, dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

Selanjutnya Renstra dijadikan pedoman bagi DPPKAD Kabupten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun 2014 - 2018 melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Selain itu Renstra juga menjadi alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKAD.

Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Renstra DPPKAD kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.

LAMPIRAN I

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif DPPKAD (2013 – 2018

)

Kabupaten Temanggung

MISI	Tujuan	sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data capaian pada tahun 2012	T					
						2013 (sesuai APBD 2013)			sesuai (DPA SKPD 2014)		
						target	prediksi capaian	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme	Meningkatnya kemampuan, profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur		Persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap total belanja langsung SKPD dalam satu tahun							
			1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran					255,796,600		300,227,500	
			a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya komunikasi, listrik & air untuk menunjang terselenggaranya kegiatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	16,992,000	12 bulan	19,990,000
			b	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2,000,000	12 bulan	2,300,000
			c	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3,000,000	12 bulan	3,450,000
d	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan administrasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	22,022,100	12 bulan	23,500,000			

			perkantoran							
		e	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	perkantoran terutama barang cetak dan foto copy data	12 bulan	12 bulan	12 bulan	8,000,000	12 bulan	9,200,
		f	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terpeliharaan alat-alat kelistrikan untuk penerangan dan keamanan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2,000,000	12 bulan	2,000,
		g	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	tersedianya bahan bacaan guna menambah wawasan pegawai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1,800,000	12 bulan	2,070,
		h	Penyediaan makanan & minuman	tersedianya kebutuhan makan dan minum pegawai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	9,993,500	12 bulan	10,997,0
		i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terfasilitasinya perjalanan dinas ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	39,995,000	12 bulan	42,495,0
		j	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dlm daerah	terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	134,995,000	12 bulan	135,995,000
		k	Jasa pelayanan perkantoran	terselenggaranya kegiatan administrasi kantor	13 bulan	13 bulan	13 bulan	14,999,000	13 bulan	48,216,5
		2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						989,900,000		150,000,000
		a	Pembangunan dan rehab	tersedianya aula dan garasi	-	1 Gedung	1 Gedung	849,930,000	-	-

			Gedung Kantor							
			b Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	<i>Terbelinya 4 buah meja kerja dan 1 buah bendera merah putih</i>	terbelinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	terbelinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	59,970,000	terbelinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	60,000,000
			c Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya kenyamanan & keamanan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10,000,000	12 bulan	15,000,000
			d Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya mobilitas kelancaran pelaksanaan tugas	<i>Service kendaraan roda 4, 6 kali, Body kit 12 kali, body repair 1 unit, belanja BBM dan perpanjangan STNK 3 Mobil, 96 motor</i>	<i>Service kendaraan roda 4, 10 kali, Body kit 10 kali, belanja BBM dan perpanjangan STNK 5 Mobil, 41 motor, ganti plat motor 56</i>	<i>Service kendaraan roda 4, 10 kali, Body kit 10 kali, belanja BBM dan perpanjangan STNK 5 Mobil, 41 motor, ganti plat motor 56</i>	70,000,000	<i>Service kendaraan roda 4, 10 kali, Body kit 10 kali, belanja BBM dan perpanjangan STNK 5 Mobil, 41 motor, ganti plat motor 56</i>	75,000,000
			3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					4,299,900		4,944,000
			a Penilaian angka kredit	terfasilitasinya penilaian	2 smter	2 smter	2 smter	4,299,900	2 smter	4,944,000

				angka kredit Penyuluh KB							
				4. Program peningkatan disiplin aparatur					-		23,000 0
			a	Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu	terpenuhinya fasilitas pakaian dinas pegawai	123 pegawai	-	-	-	123 pegawai	23,000 0
	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah		1. Program perencanaan pembangunan daerah							
			a	Kegiatan Penyusunan oleh perencanaan SKPD	tersusunnya Lakip, PK, LPPD, AMJ, dan Rekapitulasi data SKPD	-	-	-	-	-	-
Mewujudkan budaya sehat dan aksesibilitas kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui KB	Meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga		Meningkatnya kualitas kesejahteraan Keluarga							
			a.	Keluarga Pra Sejahtera		22.86	21.32	21.32		21.32	
			b.	Keluarga Sejahtera I		11.3	8.05	8.05		8.05	
			c.	Keluarga Sejahtera II		17.33	21.81	21.81		21.81	
			d.	Keluarga Sejahtera III		45.38	45.57	45.57		45.57	
			e.	Keluarga Sejahtera III plus		3.11	3.23	3.23		3.23	-
				Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan		100%	100%	100%		100%	

1. Program pembinaan kesejahteraan keluarga					44,999,000		70,000
a Kegiatan Pendataan Keluarga, Pencatatan dan Pelaporan	<i>Tersedia hasil pendataan 25 buku /th & 24 Buku umpan balik / bulan</i>	49 buku	49 buku	49 buku	44,999,000	49 buku	70,000
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun	4%	3%	3.25%		3.10%	
	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	83,02 %	84%	83%		83.20%	
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	7,55 %	7%	6%		5.70%	
	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB	80,58 %	80,89 %	81%		81.05%	
	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB	84,52 %	84,99 %	85%		85.50%	
	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh	1 : 6	1 : 6	1 : 5		1 : 4	

	KB Per Desa atau Kelurahan						
	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan	100%	100%	100%		100%	
	Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria	2,89 %	3%	3%		3.20%	
	Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk	0,67 %	0,7 %	0,67 %		0.65%	
	Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru	19428	17274	14073		14065	
	1. Program Keluarga Berencana				1,249,642,900		1,489,660
a	Kegiatan Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	Peningkatan pengetahuan terhadap program KB	40 Kali	40 Kali	40 Kali	24,850,000	40 Kali 30,000
b	Kegiatan Rapat Koordinasi Kelembagaan	Rapat Koordinasi Kepala UPT Kecamatan, Rakorcam, Rakordes masing-masing 4 kali dan Rakorda 1 kali rapat tengah tahunan	12 kali	12 kali	12 kali	59,823,000	12 kali 114,990

				c	Kegiatan Pengadaan Sarpras KB (DAK)	tersedianya peralatan KB	<i>Terbelinya Implant KIT 4 unit, dan Obgyn bed 4 unit, Komputer 5 unit, KIE KIT 51 unit, sarana kerja PLKB 70 unit</i>	terbelinya tempat sampah 2, almari 10, filling kabinet 4, whiteboard 2, kipas angin 6, komputer 6, software 6, printer 6, meja kompter 6, ups 6, modem 6, meja kerja 14, kursi kerja 150, tabung gas 2, kompor 2, gordin 2, gedung 2 bh, obgyn bed 57, iud kit 58	terbelinya tempat sampah 2, almari 10, filling kabinet 4, whiteboard 2, kipas angin 6, komputer 6, software 6, printer 6, meja kompter 6, ups 6, modem 6, meja kerja 14, kursi kerja 150, tabung gas 2, kompor 2, gordin 2, gedung 2 bh, komputer	960,680,000	1,017,500
--	--	--	--	---	---------------------------------------	--------------------------	---	---	---	-------------	-----------

d	Kegiatan Pendampingan DAK Pengadaan Sarpras KB	tersedianya peralatan KB	<i>Terbelinya Implant KIT 4 unit, dan Obgyn bed 4 unit, Komputer 5 unit, KIE KIT 51 unit, sarana kerja PLKB 70 unit, obgyn bed 57, iud kit 58</i>	iud kit 58, obgyn bed 57, software 6, meja komputer 6, gedung 2 bh	iud kit 58, obgyn bed 57, software 6, meja komputer 6, gedung 2 bh	124,284,000	komputer, software 6, meja komputer 6, gedung 2 bh	139,100
e	Kegiatan Pembangunan balai penyuluhan KB (DAK)	tersedianya UPT KB	2 unit	-	-	-	-	-
f	Kegiatan Pendampingan DAK (Pembangunan balai penyuluhan KB)	tersedianya UPT KB	2 unit	-	-	-	-	-
g	Kegiatan Kegiatan Pertemuan Medis Teknis	terlaksananya kegiatan BKBPP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,575,000	1 Kegiatan	5,500,
h	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan KB dan PP	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Bagi Pelaksana dan Pengelola Program KB & KR (bidan dan PKB)	20 upt, 2 kegiatan	20 upt, 2 kegiatan	20 upt, 2 kegiatan	8,999,950	20 upt, 2 kegiatan	9,919,
i	Kegiatan Fasilitasi Kelompok Masyarakat	Meningkatnya peserta KB sebanyak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	23,874,950	1 Kegiatan	29,990

	at/ Institusi/ Lembaga	400 akseptor						
j	Pengembangan dan Pemantauan Program	Meningkatnya pembinaan bagi kelompok catur bina keluarga	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	42,556,000	12 kelompok	42,556,000
k	Pembangunan Jaringan online dengan UPT Kecamatan/ SKPD	- Pengadaan peralatan online '- Pelatihan operator	-	-	-	-	-	99,990
2. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR						4,500,000		4,500,000
a	Kegiatan sosialisasi KRR dan KHIBA	- Meningkatkan pengetahuan tentang KRR bagi PIK Remaja (konselor Sebaya)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,500,000	1 Kegiatan	4,500,000
3. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS						10,000,000		10,000,000
a	Kegiatan Pertemuan penyuluh penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Meningkatnya pengetahuan tentang narkoba, PMS bagi Pelaksana dan Pengelola PIK Remaja dan Pengurus OSIS	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	10,000,000	2 Kegiatan	10,000,000

4. Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - PADU						303,500,000		378,600,000
a	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Kelompok BKB	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi kelompok KB						
b	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana untuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	tersedianya peralatan dan perlengkapan BKB	50 set	50 set	50 set	7,500,000	50 set	9,000,000
c	Kegiatan Pembinaan Pembantu Petugas Keluarga Berencana (PPKBD)	Meningkatnya ketrampilan Petugas KB Desa	2,180	2,180	1,891	218,000,000	1,891	284,600,000
d	Kegiatan Pelatihan Kader Keluarga Berencana Desa	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi Kader Keluarga Berencana Desa	446 orang	446 orang	446 orang	20,000,000	-	-
e	Kegiatan fasilitasi konseling kader keluarga berencana desa	Terlatihnya pengelola & tenaga prog kader	-	-	-	-	578 orang	25,000,000
f	Kegiatan Pertemuan Kelompok Bina Keluarga Balita	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi kader	200 orang	200 orang	200 orang	58,000,000	200 orang	60,000,000

			BKB desa sejumlah 10 orang di 20 kecamatan							
			5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga					20,000,000	25,000,000	
		a	Pertemuan kelompok kegiatan Bina Ekonomi Produktif (UPPKS : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi Kader UPPKS	-	60 orang	60 orang	20,000,000	60 orang	25,000,000
				Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	4%	4%		3%	
			1. 'Program Pelayanan Kontrasepsi					369,999,890	389,999,890	
		a	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	<i>Terlayannya akseptor Implant dan MOW/MOP</i>	426 orang	483 orang	483 orang	119,999,890	483 orang	124,999,890
		b	Kegiatan Pengadaan Alokant	Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi bagi Calon Peserta KB melalui pembelian implant	740 set	740 set	740 set	250,000,000	740 set	265,000,000
Mewujudkan Masyarakat Perdamaian	Meningkatkan pemberdayaan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan,		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang	100%	100%	100%		100%	

<p>dan Perkotaaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera</p>	<p>perempuan, dan perlindungan anak</p>	<p>perlindungan perempuan dan perlindungan anak</p>	<p>Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Puskesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit</p>						
			<p>Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu</p>	88%	90%	100%		100%	
			<p>Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu</p>	75%	80%	85%		85%	
			<p>Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih</p>	60%	60%	70%		70	

	Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan							
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	25%	25%	25%			25%	
	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	90%	94%	98%			98%	
	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	80%	80%	84%			84	
	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	40%	40%	50%			50%	
		1 : 2.182	1 : 2.401	1 : 2.401			1 : 2.500	
	1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					76,562,900		105,000
a	a. Fasilitasi anak low	Meningkatnya kualitas	200 anak	200 anak	200 anak	53,562,900	200 anak	70,000

		vision (Lemah Penglihatan)	& intensitas belajar anak penderita low vision						
		b c. Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Tersalurkan bantuan untuk peningkatan kegiatan PP dan PA (50 organisasi wanita)	-	50 organisasi	50 organisasi	13,000,000	50 organisasi	20,000,000
		c b. Fasilitasi Penanganan Korban kekerasan berbasis Gender dan Anak	Berkurangnya trauma psikologis korban kekerasan berbasis Gender dan Anak	25 orang	sosialisasi 200 org, supervisi 50 kasus, pendampingan 50 org, tersedia data korban KDRT	sosialisasi 200 org, supervisi 50 kasus, pendampingan 50 org, tersedia data korban KDRT	10,000,000	sosialisasi 200 org, supervisi 50 kasus, pendampingan 50 org, tersedia data korban KDRT	15,000,000
Meningkatkan Kesetaraan Gender	Meningkatnya kualitas kabupaten layak anak		Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan	60%	66%	70%		75%	
			Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengusaha Alternatif	60%	60%	70%		70%	
			Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Kesehatan Dasar	60%	60%	70%		70%	
			Cakupan Pencapaian Indikator	70%	70%	75%		75%	

		Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya							
		Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus	55%	55%	60%			60%	
	1. Program Penguatan Kelembagaan PengarusUtamaan Gender dan Anak						59,552,950		130,000
	a Fasilitasi Kegiatan Forum Anak	Terfasilitasinya program kegiatan forum anak	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		19,892,950	1 kegiatan	50,000
	b Fasilitasi dan advokasi Pengembangan kota layak anak (KLA)	Meningkatnya pemahaman tentang KLA di tingkat kelurahan dan keikutsertaan Kab.Tmg dalam evaluasi KLA TK.Nasiona l	115 peserta	sosialisasi 3x perencanaan TK kec 4 TK kel / desa 6	sosialisasi 3x perencanaan TK kec 4 TK kel / desa 6		24,660,000	sosialisasi 3x perencanaan TK kec 4 TK kel / desa 6	50,000
	c Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Anak	Meningkatnya koordinasi kelembagaan GSI satgas Kec/ Desa P2TP2A dan PPT	<i>Rakor Pokja PUG 25 org, Rakor Pokja GSI 25 org, Rakor KLA 30 org, Monev GSI / RSSIB 2 keg</i>	20 kecamatan	20 kecamatan		15,000,000	20 kecamatan	30,000

Meningkatnya kesetaraan gender		Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender	4.2	29.2	30		40	
	1. Program Penguatan Kelembagaan PengarusUtamaan Gender dan Anak						38,903,900	80,000
	a Advokasi Pelaksanaan ARG di SKPD	Meningkatnya pemahaman penyusunan dokumen ARG di SKPD	<i>advokasi PUG dan PUHA di SKPD bagi 24 org</i>	6 SKPD	6 SKPD	11,999,900	6 SKPD	20,000
	b Pelatihan kepemimpinan dan pengarusutamaan gender	Meningkatnya kemampuan kepemimpinan dan pengarusutamaan gender bagi 35 Orang eksekutif dan legislatif	-	35 orang	35 orang	26,904,000	35 orang	30,000
c Fasilitasi penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG	Terfasilitasinya program ARG dan PUG di pemangku kebijakan di pemerintahan	-	-	-	-	5 skpd	30,000	

LAMPIRAN II

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM BKBPP PENYUSUNAN RENSTRA BKBPP KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sampai dengan hari Jum'at tanggal 7 Maret 2014 telah diselenggarakan forum penyusunan Renstra BKBPP yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1..Pemaparan materi :

- a. VISI Kab Temanggung dan Isu Isu Strategis disampaikan oleh Kepala BKBPP Kab Temanggung (Masruchi Skm.M Kes.)
- b. Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang agamis,Berbudaya dan sejahtera disampaikan oleh Kabid PP (Dra. Sri Endang P MSi)
- c. Misi 5 . Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan disampaikan oleh Kabid KB (Ir.Brojosono)
- d. Misi 6. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih ,Transparan tidak KKN dan berorientasi pada Pelayanan Publik disampaikan oleh sekretaris BKBPP kab Temanggung (Dra.Sri Widji Handayani)

2.. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum BKBPP terhadap materi yang dipaparkan oleh Kepala ,Kabid dan Sekretaris , sebagaimana diskusi telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok, maka pada :

Hari dan Tanggal : Jum'at Tanggal 7 Maret 2014

Jam :10.00 WIB

Tempat :Aula BKBPP Kab Temanggung

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) BKBPP , tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan pelayanan rancangan renstra BKBPP Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas BKBPP Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja BKBPP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang – sidang kelompok forum BKBPP Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.

KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT
dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan renstra BKBPP Kabupaten
Temanggung Tahun 2014 – 2018

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 7 Maret 2014
Kepala BKBPP
Selaku pimpinan sidang Forum BKBPP

MASRUCHI, Skm. M.Kes

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM BKBP

NOMOR :
TANGGAL : 7 Maret 2014

Penyusun Renstra BKBPP Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Masruchi Skm M Kes	BKBPP	Kepala	1.
2	Dra.Sri Widji Handayani	BKBPP	Sekretaris	2
3	Tri Agus Sutopo SH	BKBPP	Kabid KS	3

4	Ir.Brojosono	BKBPP	Kabid KBKR	4
5	Johan S hariyadi SH MM	BKBPP	Kabid Data dan Hal	5
6	Dra.Sri Endang P Msi	BKBPP	Kabid PP dan PA	6
7	Endang Diah Ps s sos	BKBPP	Kasubag Perencanaan	7
8	Eky Ekayadi Atmajaya A.Md	BKBPP	Staf Perencanaan	8

Temanggung, 7 Maret 2014
Kepala BKBPP
Selaku pimpinan sidang Forum BKBPP

MASRUCHI, SKM, M.Kes

Daftar hadir Penyusun Renstra BKBPP Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Tanggal : Maret 2014

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Masruchi Skm M Kes	BKBPP	Kepala	1.
2	Dra.Sri Widji Handayani	BKBPP	Sekretaris	2
3	Tri Agus Sutopo SH	BKBPP	Kabid KS	3
4	Ir.Brojosono	BKBPP	Kabid KBKR	4
5	Johan S hariyadi SH MM	BKBPP	Kabid Data dan Hal	5
6	Dra.Sri Endang P Msi	BKBPP	Kabid PP dan PA	6
7	Endang Diah Ps s sos	BKBPP	Kasubag Perencanaan	7
8	Eky Ekayadi Atmajaya A.Md	BKBPP	Staf Perencanaan	8

Temanggung, Maret 2014
Kepala BKBPP
Selaku pimpinan sidang Forum BKBPP

MASRUCHI, SKM, M.Kes

Daftar Hadir Penyusun Renstra BKBPP Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Tanggal : Januari 2014

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Masruchi Skm M Kes	BKBPP	Kepala	1.
2	Dra.Sri Widji Handayani	BKBPP	Sekretaris	2
3	Tri Agus Sutopo SH	BKBPP	Kabid KS	3
4	Ir.Brojosono	BKBPP	Kabid KBKR	4
5	Johan S hariyadi SH MM	BKBPP	Kabid Data dan Hal	5
6	Dra.Sri Endang P Msi	BKBPP	Kabid PP dan PA	6
7	Endang Diah Ps s sos	BKBPP	Kasubag Perencanaan	7
8	Eky Ekayadi Atmajaya A.Md	BKBPP	Staf Perencanaan	8

Temanggung, Januari 2014
Kepala BKBPP
Selaku pimpinan sidang Forum BKBPP

MASRUCHI, SKM, M.Kes

Daftar hadir Penyusun Renstra BKBPP Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018

Tanggal : Pebruari 2014

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Masruchi Skm M Kes	BKBPP	Kepala	1.
2	Dra.Sri Widji Handayani	BKBPP	Sekretaris	2
3	Tri Agus Sutopo SH	BKBPP	Kabid KS	3
4	Ir.Brojosono	BKBPP	Kabid KBKR	4
5	Johan S hariyadi SH MM	BKBPP	Kabid Data dan Hal	5
6	Dra.Sri Endang P Msi	BKBPP	Kabid PP dan PA	6
7	Endang Diah Ps s sos	BKBPP	Kasubag Perencanaan	7
8	Eky Ekayadi Atmajaya A.Md	BKBPP	Staf Perencanaan	8

Temanggung, Pebruari 2014
Kepala BKBPP
Selaku pimpinan sidang Forum BKBPP

MASRUCHI, SKM, M.Kes

Daftar Hadir Penyusun Renstra BKBPP Kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2018
Tanggal : 7 Maret 2014

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Masruchi Skm M Kes	BKBPP	Kepala	1.
2	Dra.Sri Widji Handayani	BKBPP	Sekretaris	2
3	Tri Agus Sutopo SH	BKBPP	Kabid KS	3
4	Ir.Brojosono	BKBPP	Kabid KBKR	4
5	Johan S hariyadi SH MM	BKBPP	Kabid Data dan Hal	5
6	Dra.Sri Endang P Msi	BKBPP	Kabid PP dan PA	6
7	Endang Diah Ps s sos	BKBPP	Kasubag Perencanaan	7
8	Eky Ekayadi Atmajaya A.Md	BKBPP	Staf Perencanaan	8

Temanggung, 7 Maret 2014
Kepala BKBPP

MASRUCHI, SKM, M.Kes

LAMPIRAN IV : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD
NOMOR :
TANGGAL : 7 Maret 2014

NO	Nama	Lembaga / instansi	Jabatan / Alamat	Tanda Tangan
1	Masruchi Skm M Kes	BKBPP	Kepala	1.
2	Dra.Sri Widji Handayani	BKBPP	Sekretaris	2
3	Tri Agus Sutopo SH	BKBPP	Kabid KS	3
4	Ir.Brojoso	BKBPP	Kabid KBKR	4
5	Johan S hariyadi SH MM	BKBPP	Kabid Data dan Hal	5
6	Dra.Sri Endang P Msi	BKBPP	Kabid PP dan PA	6
7	Endang Diah Ps s sos	BKBPP	Kasubag Perencanaan	7
8	Eky Ekayadi Atmajaya A.Md	BKBPP	Staf Perencanaan	8

Temanggung, 7 Maret 2014
Kepala BKBPP
Selaku pimpinan sidang Forum BKBPP

MASRUCHI, SKM, M.Kes

LAMPIRAN V : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM

KOMUNIKASI BKBPP

NOMOR :

TANGGAL : 7 Maret 2014

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum BKBPP terhadap
Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra BKBPP Tahun 2013 – 2018
Kabupaten Temanggung
Tanggal : 7 Maret 2014
Tempat : Aula BKBPP Kab Temanggung

ISU STRATEGIS :

1. Belum terpenuhinya standart kompetensi seluruh tenaga pengelola program internal dan eksternal sampai ke lini lapangan
2. Belum optimalnya pemerintah kabupaten dalam mendukung peningkatan SDM Pengelola Program KB melalui pelatihan
3. Penelitian dan Pengembangan masih belum dianggap penting
4. Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian dalam penentuan kebijaksanaan
5. Belum optimalnya kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan pusat studi dan lembaga
6. Semakin berkurangnya petugas lini lapangan KB
7. Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan MKJP
8. Belum efektifnya kelembagaan PUG,PUHA,pemberdayaan perempuan , tumbuh kembang anak,KB serta jejaring kerjanya
9. Rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan dan lembaga lembaga pengambilan
10. Lemahnya sistem data dan informasi gender ,anak dan KB

VISI : TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS

BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS,
BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;

Tujuan	Sasaran	Strate
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak	-Meningkatkan keterse informasi gender dan a - Meningkatkan keterca Pemberdayaan peremp perlindungan anak
Meningkatkan kesetaraan gender	Meningkatnya Kualitas Kabupaten Layak Anak	.Penguatan kelembaga KLA
	Meningkatnya kesetaraan gender	Meningkatkan Prog dan utamaan gender dan ar peningkatan kapasitas

		kelembagaan masy utk KB dan KS
Misi 5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan		
Tujuan	Sasaran	Strate
Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Keluarga Berencana	Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Keluarga	Meningkatkan peran se melalui pemberdayaan
	Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat Atas Pelayanan Keluarga Berencana	Meningkatkan kualitas layanan KB melalui per kelembagaan KB
Misi 6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik.		
Tujuan	Sasaran	Strate
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebnas kolusi, korupsi dan Nepotisme	meningkatnya kemampuan , profesionalisme dan kesejahteraan SDM aparatur	a. Peningkatan kompete SDM apatur dan peni pengelolaan hukum org laksana b. Pengelolaan keuanga dan akuntabel c. Peningkatan fungsi k kwalitaspelayanan adm perkantoran kerumah t
Meningkatkan kualitas perencanaan pengendalian , evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah	meningkatnya kualitas perencanaan , pengendalian evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah	a. Peningkatan kwalita program dan anggaran b. Peningkatan fungsi p internal pemerintah unt pemerintah yang baik

LAMPIRAN VI

MISI	Tujuan	sasaran	Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Daerah (Indikator Program) dan Indikator Kegiatan	Data capaian pada tahun 2012	T				
						2013 (sesuai APBD 2013)			sesuai (DPA SKP 2014)	
						target	prediksi capaian	Rp	target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan pemerintahan yang bersih,	Terwujudnya pemerintahan yang	Meningkatnya kemampuan, profesio		Persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap						

transparan, tidak KKN, dan berorientasi pada pelayanan publik	bersih dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme	nalisme dan kesejahteraan SDM aparatur		total belanja langsung SKPD dalam satu tahun							
			1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran					255,796,600		300,2275	
			a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya komunikasi, listrik & air untuk menunjang terselenggaranya kegiatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	16,992,000	12 bulan	19,990
			b	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	terpeliharanya sarana dan prasarana kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2,000,000	12 bulan	2,300,
			c	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	3,000,000	12 bulan	3,450,
			d	Penyediaan alat tulis kantor	terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	22,022,100	12 bulan	23,500
			e	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	perkantoran terutama barang cetak dan foto copy data	12 bulan	12 bulan	12 bulan	8,000,000	12 bulan	9,200,
			f	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	terpeliharanya alat-alat kelistrikan untuk penerangan dan keamanan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	2,000,000	12 bulan	2,000,

			g	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	tersedianya bahan bacaan guna menambah wawasan pegawai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1,800,000	12 bulan	2,070,
			h	Penyediaan makanan & minuman	tersedianya kebutuhan makan dan minum pegawai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	9,993,500	12 bulan	10,997,000
			i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	terfasilitasinya perjalanan dinas ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	39,995,000	12 bulan	42,495,000
			j	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dlm daerah	terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	134,995,000	12 bulan	135,995,000
			k	Jasa pelayanan perkantoran	terselenggaranya kegiatan administrasi kantor	13 bulan	13 bulan	13 bulan	14,999,000	13 bulan	48,216,500
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur						989,900,000		150,000,000
			a	Pembangunan dan rehab Gedung Kantor	tersedianya aula dan garasi	-	1 Gedung	1 Gedung	849,930,000	-	-
			b	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	<i>Terbelinya 4 buah meja kerja dan 1 buah bendera merah putih</i>	terbelinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	terbelinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	59,970,000	terbelinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	60,000,000
			c	Pemeliharaan rutin /berkala gedung	Meningkatnya kenyamanan &	12 bulan	12 bulan	12 bulan	10,000,000	12 bulan	15,000,000

			kantor	keamanan gedung kantor							
			d	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Meningkatnya mobilitas kelancaran pelaksanaan tugas	Service kendaraan roda 4, 6 kali, Body kit 12 kali, body repair 1 unit, belanja BBM dan perpanjangan STNK 3 Mobil, 96 motor	Service kendaraan roda 4, 10 kali, Body kit 10 kali, belanja BBM dan perpanjangan STNK 5 Mobil, 41 motor, ganti plat motor 56	Service kendaraan roda 4, 10 kali, Body kit 10 kali, belanja BBM dan perpanjangan STNK 5 Mobil, 41 motor, ganti plat motor 56	70,000,000		75,000,000
			3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						4,299,900		4,944,
			a	Penilaian angka kredit	terfasilitasinya penilaian angka kredit Penyuluh KB	2 smter	2 smter	2 smter	4,299,900	2 smter	4,944,
			4. Program peningkatan disiplin aparatur						-		23,000,000
			a	Pengadaan pakaian dinas hari-hari tertentu	terpenuhinya fasilitas pakaian dinas pegawai	123 pegawai	-	-	-	123 pegawai	23,000,000
Meningkatkan	Meningkatnya kualitas		1. Program perencanaan pembangunan daerah								

	kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah	perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah	a. Kegiatan Penyusunan oleh perencanaan SKPD	tersusunnya Lakip, PK, LPPD, AMJ, dan Rekapitulasi data SKPD	-	-	-	-	-	-
Mewujudkan budaya sehat dan aksesibilitas kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui KB	Meningkatnya derajat kesejahteraan keluarga	Meningkatnya kualitas kesejahteraan Keluarga							
			a. Keluarga Pra Sejahtera	22.86	21.32	21.32		21.32		
			b. Keluarga Sejahtera I	11.3	8.05	8.05		8.05		
			c. Keluarga Sejahtera II	17.33	21.81	21.81		21.81		
			d. Keluarga Sejahtera III	45.38	45.57	45.57		45.57		
			e. Keluarga Sejahtera III plus	3.11	3.23	3.23		3.23	-	
			Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100%	100%	100%		100%		
			1. Program pembinaan kesejahteraan keluarga					44,999,000		70,000,000
a. Kegiatan Pendataan Keluarga, Pencatatan dan Pelaporan	Tersedianya hasil pendataan 25 buku /th & 24 Buku umpan balik / bulan	49 buku	49 buku	49 buku	44,999,000	49 buku	70,000,000			
	Cakupan Pasangan Usia Subur yang Istrinya dibawah Usia 20 tahun	4%	3%	3.25%		3.10%				

Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur Menjadi Peserta KB Aktif	83,02 %	84%	83%	83.20%
Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB tidak Terpenuhi (Unmet need)	7,55 %	7%	6%	5.70%
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita Ber-KB	80,58 %	80,89 %	81%	81.05%
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber-KB	84,52 %	84,99 %	85%	85.50%
Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana atau Penyuluh KB Per Desa atau Kelurahan	1 : 6	1 : 6	1 : 5	1 : 4
Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana per desa/Kelurahan	100%	100%	100%	100%
Persentase Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pria	2,89 %	3%	3%	3.20%
Menurunnya tingkat pertumbuhan	0,67 %	0,7 %	0,67 %	0.65%

	penduduk						
	Besaran Sasaran PUS Menjadi Peserta KB Baru	19428	17274	14073		14065	
1. Program Keluarga Berencana					1,249,642,900		1,489,660,000
a	Kegiatan Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE)	Peningkatan pengetahuan terhadap program KB	40 Kali	40 Kali	40 Kali	24,850,000	40 Kali 30,000,000
b	Kegiatan Rapat Koordinasi Kelembagaan	Rapat Koordinasi Kepala UPT Kecamatan, Rakorcam, Rakordes masing-masing 4 kali dan Rakorda 1 kali rapat tengah tahunan	12 kali	12 kali	12 kali	59,823,000	12 kali 114,900,000

				c	Kegiatan Pengadaan Sarpras KB (DAK)	tersedianya peralatan KB	<i>Terbelinya Implant KIT 4 unit, dan Obgyn bed 4 unit, Komputer 5 unit, KIE KIT 51 unit, sarana kerja PLKB 70 unit</i>	terbelinya tempat sampah 2, almari 10, filling kabinet 4, whiteboard 2, kipas angin 6, komputer 6, software 6, printer 6, meja kompter 6, ups 6, modem 6, meja kerja 14, kursi kerja 150, tabung gas 2, kompor 2, gordin 2, gedung 2 bh, obgyn bed 57, iud kit 58	terbelinya tempat sampah 2, almari 10, filling kabinet 4, whiteboard 2, kipas angin 6, komputer 6, software 6, printer 6, meja kompter 6, ups 6, modem 6, meja kerja 14, kursi kerja 150, tabung gas 2, kompor 2, gordin 2, gedung 2 bh, komputer	960,680,000	1,017,500
--	--	--	--	---	---------------------------------------	--------------------------	---	---	---	-------------	-----------

d	Kegiatan Pendampingan DAK Pengadaan Sarpras KB	tersedianya peralatan KB	Terbelinya Implant KIT 4 unit, dan Obgyn bed 4 unit, Komputer 5 unit, KIE KIT 51 unit, sarana kerja PLKB 70 unit, obgyn bed 57, iud kit 58	iud kit 58, obgyn bed 57, software 6, meja komputer 6, gedung 2 bh	iud kit 58, obgyn bed 57, software 6, meja komputer 6, gedung 2 bh	124,284,000	komputer, software 6, meja komputer 6, gedung 2 bh	139,100
e	Kegiatan Pembangunan balai penyuluhan KB (DAK)	tersedianya UPT KB	2 unit	-	-	-	-	-
f	Kegiatan Pendampingan DAK (Pembangunan balai penyuluhan KB)	tersedianya UPT KB	2 unit	-	-	-	-	-
g	Kegiatan Kegiatan Pertemuan Medis Teknis	terlaksananya kegiatan BKBPP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,575,000	1 Kegiatan	5,500,
h	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan KB dan PP	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Bagi Pelaksana dan Pengelola Program KB & KR (bidan dan PKB)	20 upt, 2 kegiatan	20 upt, 2 kegiatan	20 upt, 2 kegiatan	8,999,950	20 upt, 2 kegiatan	9,919,
i	Kegiatan Fasilitasi Kelompok Masyarakat	Meningkatnya peserta KB sebanyak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	23,874,950	1 Kegiatan	29,990

	at/ Institusi/ Lembaga	400 akseptor						
j	Pengembangan dan Pemantauan Program	Meningkatnya pembinaan bagi kelompok catur bina keluarga	12 kelompok	12 kelompok	12 kelompok	42,556,000	12 kelompok	42,556,000
k	Pembangunan Jaringan online dengan UPT Kecamatan/ SKPD	- Pengadaan peralatan online '- Pelatihan operator	-	-	-	-	-	99,990
2. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR						4,500,000		4,500,000
a	Kegiatan sosialisasi KRR dan KHIBA	- Meningkatkan pengetahuan tentang KRR bagi PIK Remaja (konselor Sebaya)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	4,500,000	1 Kegiatan	4,500,000
3. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS						10,000,000		10,000,000
a	Kegiatan Pertemuan penyuluh penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Meningkatnya pengetahuan tentang narkoba, PMS bagi Pelaksana dan Pengelola PIK Remaja dan Pengurus OSIS	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	10,000,000	2 Kegiatan	10,000,000

4. Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - PADU						303,500,000		378,600,000
a	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Kelompok BKB	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi kelompok KB						
b	Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana untuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	tersedianya peralatan dan perlengkapan BKB	50 set	50 set	50 set	7,500,000	50 set	9,000,000
c	Kegiatan Pembinaan Pembantu Petugas Keluarga Berencana (PPKBD)	Meningkatnya ketrampilan Petugas KB Desa	2,180	2,180	1,891	218,000,000	1,891	284,600,000
d	Kegiatan Pelatihan Kader Keluarga Berencana Desa	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi Kader Keluarga Berencana Desa	446 orang	446 orang	446 orang	20,000,000	-	-
e	Kegiatan fasilitasi konseling kader keluarga berencana desa	Terlatihnya pengelola & tenaga prog kader	-	-	-	-	578 orang	25,000,000
f	Kegiatan Pertemuan Kelompok Bina Keluarga Balita	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi kader	200 orang	200 orang	200 orang	58,000,000	200 orang	60,000,000

			BKB desa sejumlah 10 orang di 20 kecamatan							
			5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga					20,000,000	25,000,000	
		a	Pertemuan kelompok kegiatan Bina Ekonomi Produktif (UPPKS : Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan bagi Kader UPPKS	-	60 orang	60 orang	20,000,000	60 orang	25,000,000
				Cakupan penyediaan alat dan kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	4%	4%		3%	
			1. 'Program Pelayanan Kontrasepsi					369,999,890	389,999,890	
		a	Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	<i>Terlayannya akseptor Implant dan MOW/MOP</i>	426 orang	483 orang	483 orang	119,999,890	483 orang	124,999,890
		b	Kegiatan Pengadaan Alokant	Meningkatnya Pelayanan Kontrasepsi bagi Calon Peserta KB melalui pembelian implant	740 set	740 set	740 set	250,000,000	740 set	265,000,000
Mewujudkan Masyarakat Perdamaian	Meningkatkan pemberdayaan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan,		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang	100%	100%	100%		100%	

<p>dan Perkotaaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera</p>	<p>perempuan, dan perlindungan anak</p>	<p>perlindungan perempuan dan perlindungan anak</p>	<p>Mendapatkan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Terlatih di Puskesmas Mampu Tata Laksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit</p>						
			<p>Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu</p>	88%	90%	100%		100%	
			<p>Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan didalam Unit Pelayanan Terpadu</p>	75%	80%	85%		85%	
			<p>Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih</p>	60%	60%	70%		70	

	Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan							
	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	25%	25%	25%			25%	
	Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	90%	94%	98%			98%	
	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	80%	80%	84%			84	
	Rasio Kekerasan dalam rumah tangga	40%	40%	50%			50%	
		1 : 2.182	1 : 2.401	1 : 2.401			1 : 2.500	
	1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					76,562,900		105,0000
a	a.							
.	Fasilitasi anak low	Meningkatnya kualitas	200 anak	200 anak	200 anak	53,562,900	200 anak	70,0000

		vision (Lemah Penglihatan)	& intensitas belajar anak penderita low vision						
		b c. Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	Tersalurkan bantuan untuk peningkatan kegiatan PP dan PA (50 organisasi wanita)	-	50 organisasi	50 organisasi	13,000,000	50 organisasi	20,000,000
		c b. Fasilitasi Penanganan Korban kekerasan berbasis Gender dan Anak	Berkurangnya trauma psikologis korban kekerasan berbasis Gender dan Anak	25 orang	sosialisasi 200 org, supervisi 50 kasus, pendampingan 50 org, tersedia data korban KDRT	sosialisasi 200 org, supervisi 50 kasus, pendampingan 50 org, tersedia data korban KDRT	10,000,000	sosialisasi 200 org, supervisi 50 kasus, pendampingan 50 org, tersedia data korban KDRT	15,000,000
Meningkatkan Kesetaraan Gender	Meningkatnya kualitas kabupaten layak anak	Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan	60%	66%	70%		75%		
		Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengusaha Alternatif	60%	60%	70%		70%		
		Cakupan Pencapaian Indikator Klaster Kesehatan Dasar	60%	60%	70%		70%		
		Cakupan Pencapaian Indikator	70%	70%	75%		75%		

		Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya							
		Cakupan Pencapaian Indikator Kluster Perlindungan Khusus	55%	55%	60%			60%	
	1. Program Penguatan Kelembagaan PengarusUtamaan Gender dan Anak						59,552,950		130,000
	a Fasilitasi Kegiatan Forum Anak	Terfasilitasinya program kegiatan forum anak	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		19,892,950	1 kegiatan	50,000
	b Fasilitasi dan advokasi Pengembangan kota layak anak (KLA)	Meningkatnya pemahaman tentang KLA di tingkat kelurahan dan keikutsertaan Kab.Tmg dalam evaluasi KLA TK.Nasiona l	115 peserta	sosialisasi 3x perencanaan TK kec 4 TK kel / desa 6	sosialisasi 3x perencanaan TK kec 4 TK kel / desa 6		24,660,000	sosialisasi 3x perencanaan TK kec 4 TK kel / desa 6	50,000
	c Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Anak	Meningkatnya koordinasi kelembagaan GSI satgas Kec/ Desa P2TP2A dan PPT	<i>Rakor Pokja PUG 25 org, Rakor Pokja GSI 25 org, Rakor KLA 30 org, Monev GSI / RSSIB 2 keg</i>	20 kecamatan	20 kecamatan		15,000,000	20 kecamatan	30,000

Meningkatnya kesetaraan gender		Meningkatnya Implementasi Anggaran Responsif Gender	4.2	29.2	30		40	
	1. Program Penguatan Kelembagaan PengarusUtamaan Gender dan Anak					38,903,900		80,000
	a Advokasi Pelaksanaan ARG di SKPD	Meningkatnya pemahaman penyusunan dokumen ARG di SKPD	<i>advokasi PUG dan PUHA di SKPD bagi 24 org</i>	6 SKPD	6 SKPD	11,999,900	6 SKPD	20,000
	b Pelatihan kepemimpinan dan pengarusutamaan gender	Meningkatnya kemampuan kepemimpinan dan pengarusutamaan gender bagi 35 Orang eksekutif dan legislatif	-	35 orang	35 orang	26,904,000	35 orang	30,000
c Fasilitasi penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan ARG	Terfasilitasinya program ARG dan PUG di pemangku kebijakan di pemerintahan	-	-	-	-	5 skpd	30,000	